

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Kota Banjarmasin

(The Influence Of Local Revenue And Balancing Funds On Regional Expenditure In Banjarmasin)

Syiblia Deya Hapsa*, Saipudin

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat

*hooniedeva@gmail.com

Abstract

This research was conducted to analyze the factors that influence Regional Expenditures in Banjarmasin City. With reference to the variable Regional Original Income (PAD), the Balancing Fund. In principle, the greater the contribution of PAD to expenditure will show the smaller regional dependence on the center. where regional expenditure can be influenced by PAD and Balancing Funds.

Data used is secondary data consisting of Times Series Data the 2007 period 2016, where the data is analyzed using multiple linear regression models, wich is seen as from the magnitude of R2 seen from the test coefficient of determination, testing variables simultaneously (Test F) and partly (T Test). To find out whether Regional Original Revenue and influential Balancing Funds on Regional Expenditure in Banjarmasin city. The result of this study indicated that the Regional Original income variable has a significant effect on regional Expenditure, while the balancing fund has no significant effect on Regional Expenditure.

Keywords: *Regional Expenditures, Regional Original Revenue and Balancing*

Abstraksi

Penelitian tersebut menganalisa faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah di Kota Banjarmasin. Dengan mengacu dengan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan. Prinsip tersebut semakin besar pengeluaran PAD maka menunjukkan kecilnya ketergantungan pada daerah pusat.

Penelitian ini bertempat di Banjarmasin, data ini memakai data sekunder terdiri dari data *time series* selama periode 2007 sampai 2016. Dari data tersebut dilihat memakai model *regresi linier berganda* yaitu besarnya R_2 dari uji koefisien *determinasi* yang telah diuji secara simultan (uji f) dan telah dilakukan uji secara parsial (uji t) mengetahuiseberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dan Dana Perimbangan Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang perngaruh PAD signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Kata kunci: Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

PENDAHULUAN

LatarBelakang

Kebijakan desentralisasi adalah kebijakan yang menjadikan yang berwujud secara mandiri terhadap suatu daerah. Kebijakan ini sudah menjadi pilihan terbaik disuatu negara maju maupun negara berkembang yaitu menjalankan kebijakan ekonomi khususnya Indonesia (Haryanto,2005). Jenis-jenis terpenting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya yaitu dilihat dari posisi keuangannya. (Rahmawati, 2010. Posisi keuangan di lihat dari APBD yang ditentukan besarnya penerimaan serta pengeluaran daerah untuk membiayai semua kegiatan pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran dan juga merupakan perencanaan keuangan daerah.

Pada tabel dibawah ini mengenai jumlah belanja daerah Kota Banjarmasin dari tahun 2007–2016.

Tabel 1.1
Total Belanja Daerah Di Kota Banjarmasin Tahun 2007 – 2016
(DalamMilyar Rupiah)

Tahun	Belanja Daerah (Rp)
2007	203.996.58
2008	487.549.12
2009	518.158.83
2010	519.445.00
2011	557.788.00
2012	683.174.16
2013	718.131.03
2014	966.998.00
2015	1.369.261.00
2016	1.469.417.92

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kota Banjarmasin

Pada data diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2007 sampai 2016 terjadi peningkatanjumlahbelanjadaerah di kota Banjarmasin..

Tabel 1.2

**Total PAD dan Dana Perimbangan di Kota Banjarmasin Periode tahun 2007 -2016
(Dalam Milyar Rupiah)**

Tahun	PAD (Rp)	%	Dana Perimbangan (Rp)	%
2007	45.572.94	0,37	394.693.21	1,29
2008	62.555.36	3,8	445.675.86	1,49
2009	64.994.80	4,2	509.325.68	1,19
2010	67.765.38	1,58	570.350.78	5,02
2011	57.007.00	1,38	442.371.00	-2,24
2012	84.830.64	6,23	664.770.00	3,82
2013	138.086.00	5,67	548.643.00	-1,74
2014	216.427.65	4,35	758.384.00	1,10
2015	225.821.05	9,4	842.336.75	6,95
2016	247.258,42	1,74	848.197.80	3,12

Sumber :BadanKeuangan Daerah Kota Banjarmasin

Adapun penelitian serupa yang telah diteliti oleh (Nur, 2009) berjudul Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Alokasi, Umm Terhadap Belanja Daerah di Jawa Tengah. Dalam penelitian tersebut PAD dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan pada Belanja Daerah di Jawa Tengah, dapat dilihat pada tingkat ketergantungan belanja daerah yang paling dominan terhadap PAD dari pada Dana Perimbangan. Dari uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian yaitu **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Kota Banjarmasin”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh PAD terhadap belanja daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Era otonomi daerah yang sekarang ini pada setiap daerah harus dituntut untuk tidak bisa di elakkan. Dalam sumber daya bisa diatasi.

Sumber-sumber yang menyatakan bahwa penerimaan yang sudah dijelaskan oleh UU No.32 Tahun 2004 mengenai penerimaan terdiri dari::

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Belanja Daerah

Perimbangan keuangan daerah memiliki hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai pada kekayaan bersih pada periode tahun tertentu. Merincikan bias terbagi dalam dua bentuk yang didasari oleh sifat dan fungsinya. Pada sifat ekonomisnya yang didasari oleh belanja daerah terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, bantuan sosial dan bantuan hibah. Sedangkan berdasarkan fungsinya belanja daerah terdiri dari belanja pembangunan perumahan, fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pariwisata budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.

Pendapatan Asli Daerah

Adalah pendapatan dipungut sendiri dan bersumber pada pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah memiliki pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usahamilik negara (BUMD), dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Dana Perimbangan

Dana ini bersumber dari pendapatan, APBN beralokasikan pada daerah berguna mendanai kebutuhan pada daerah untuk menunjukkan pelaksanaan desentralisasi. Jumlah dan ini ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah produksi jasa dan barang pada suatu daerah menyebabkan adanya peningkatan jumlah produksi. Pertumbuhan itu sendiri dapat diartikan ungkapan yang menggambarkan adanya tingkat perkembangan. Disamping itu bisa dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi ini beruna untuk mengukur potensi yang telah dicapai oleh perkembangan perekonomian suatu negara. Adapun perkembangan bisa dilihat

pada kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Karena pertumbuhan ekonomi dapat diartikan keadaan perekonomian yang ditunjukkan oleh kenaikan PDB suatu negara jika dibandingkan dengan tahun berikutnya.

Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan. Setiap tahunnya pada bidang dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat yang berbagai macam-macam program yang sudah dibuat atau berbagai sektor (Suparmoko, 1998). Teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah di kelompokkan menjadi golongan (ada tiga):

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah
2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah
3. Teori Peacock dan Wiseman.

Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model yang telah dikembangkan oleh *Rostow* berhubungan untuk perkembangan pada pengeluaran pemerintah dengan tahapan untuk membangun ekonomi antara awal perkembangan ekonomi yang dibedakan antara tahapan awal yaitu tahapan tersebut pemerintah harus menyediakan fasilitas prasarana seperti pendidikan, kesehatan, sarana transportasi. Selain itu pada tahap menengah, perkembangan ekonomi semakin kompleks. *Rostow* juga berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunann.

Hukum Wagner

Hukum *Wagner* terkenal dengan "*The law Of Expanding State Expenditure*". Artinya *Wagner* mengapa peran pemerintah menjadi semakin kuat terutama menyebabkan hubungan yang timbul dalam masyarakat tersebut.

Berikut formula *Wagner*:

$$\frac{PkPP1}{PPK1} < \frac{PkPP2}{PPK2} < \frac{PkPPn}{PPKn}$$

Keterangan :

PkPP: Pengeluaran Penerima Perkapita

PPK: Pendapatan Perkapita, yaitu GDP/jumlah Pernduduk

1,2.. **n:** Waktu (Tahun)

Teori Peacock dan Wiseman

Pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya penerimaan pajak yang disebabkan oleh pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat dan menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Peningkatan PDB dalam keadaan normal juga menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (PD) memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Banjarmasin. Pengumpulan data dengan yang sudah diolah metode yang dimana data ini yang sudah dikumpulkan dengan metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan. Setelah itu dilalui berbagai pencatatan dan perhitungan dengan cara menghimpun berbagai sumber dari informasi terkait untuk menyelesaikan masalah yang didasari data-data relevan. Sumber ini penggunaannya dengan memakai data metrik yang diambil dari data eksternal yaitu data dari Badan Pusat Statistik. Data tersebut yaitu data kuantitatif yang merupakan angka dan bersifat objektif. Data kuantitatif terdiri dari belanja daerah, PAD, dan dana perimbangan. Data tersebut diambil dari periode 2007 sampai 2016 (10 tahun) melalui *data time series*. Teknik analisis data dari penelitian ini adalah menggunakan analisis *time series*, yang merupakan data waktu misalnya harian, bulan dan tahun. *Data time series* berguna untuk mengambil keputusan untuk memperkirakan kejadian yang akan datang. Karena perubahan data tersebut waktunya beberapa periode masa lalu akan kembali terulang pada masa sekarang. Di bawah ini ada beberapa hubungan pada variabel dapat ditulis:

$$Y = f (X_1, X_2, X_3..(X_n))$$

Menggunakan persamaan linier berganda, maka persamaan diatas ditulis sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

dimana :

Y =Belanja Daerah

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (rupiah)

X_2 = Dana Perimbangan (Rupiah)

μ = *error* (kesalahan pengganggu)

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Belanja Daerah

Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah disetujui oleh DPR. APBD yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah. Pada tahun anggaran meliputi 1 tahun.

Tabel 1.3
Total Belanja Daerah Di Kota Banjarmasin tahun 2007 – 2016
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Belanja Daerah (rupiah)	Kenaikan	%
2007	203.996.58	203.597.54	1,38
2008	487.549.12	30.609.71	6,23
2009	518.158.83	38.343.00	7,40
2010	519.445.00	1.286.17	2,24
2011	557.788.00	125.386.16	2.35
2012	683.174.16	34.956.87	5,11
2013	718.131.03	248.866.97	3.46
2014	966.998.00	402.263.00	4,16
2015	1.369.261.00	100.156.92	7,41
2016	1.469.417.92	-	2,62

Sumber :BadanPengelolaanKeuangan Daerah kota Banjarmasin

Berdasarkan Tabel 1.3 diperoleh instansi terkait menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah daerah dari tahun ke tahun selama periode 10 tahun yaitu dari 2007 hingga 2016 terjadi peningkatan jumlah Belanja Daerah di Kota Banjarmasin bahwa dari tahun 2007 yaitu sekitar 203.996.58 rupiah yang mengalami kenaikan sebesar 30.609.71 rupiah atau sekitar 6,23% ,sedangkan kenaikan tertinggi itu terjadi pada tahun 2014 dan 2015 yaitu 966.998.00

di tahun 2014 dan 1.369.261.00 atau mengalami kenaikan sebesar 402.263.00 yaitu sekitar 4,16 % dan kenaikan 100.156.92 rupiah atau 7.41 % dari tahun sebelumnya yaitu 718.131.03 rupiah di tahun 2013, sedangkan di tahun 2010 adalah tahun yang paling sedikit kenaikan yaitu sekitar 1.286.17 rupiah atau sekitar 2,41% ini menjelaskan bahwa pemerintah Kota Banjarmasin Memiliki kegiatan Pembangunan dan Perekonomian Daerah yang di peroleh dan di pergunakan untuk membiyai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 1.4

Total PAD di Kota Banjarmasin Tahun 2007 – 2016

(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (rupiah)	%
2007	45.572.94	0,37
2008	67.765.38	4,2
2009	64.994.80	3,8
2010	62.555.36	1,58
2011	57.007.00	1,38
2012	84.830.64	6,27
2013	138.086.00	5,67
2014	216.427.65	4,35
2015	225.821.05	9,4
2016	247.258,42	1,74

Sumber :BadanKeuangan Daerah Kota Banjarmasin

Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin memperlihatkan peningkatan setiap tahunnya dapat kita lihat pada tahun 2007 jumlah Pendapatan Asli Daerah itu adalah 45.572.94 rupiah yaitu sekitar 0,37%, di tahun 2008 mengalami peningkatan sekitar 62.555.36 atau sekitar 3,8% yang di susul pada tahun-tahun berikutnya yaitu di tahun 2009 64.994.80 rupiah dan 2010 67.765.38 yaitu sekitar 4,2 % di tahun 2009 dan 1.58% di tahun 2010, namun pada tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah

mengalami menurun dari 64.994.80 menjadi 57.007.00 rupiah yaitu sekitar 1,3%, namun pada tahun-tahun selanjutnya kembali mengalami peningkatan di tahun 2012 yaitu sebesar 84.830.64 rupiah sekitar 6,27% , di tahun 2013 dan 2014 yaitu sekitar 138.086.00 rupiah dan 216.427.65 rupiah atau sekitar 5.67 di tahun 2013 dan 4,34% di tahun 2014, dan Pendapatan terbesar terjadi di tahun 2015 dan 2016 yaitu sekitar 225.821.05 rupiah dan 247.258.47 rupiah yaitu sekitar 11.14%. Hal inidi karenakan semakin besar sumbangan PAD maka pengeluaran akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah ke pada pemerintah pusat (Edision, 2006).

Dana Perimbangan

Tabel 1.5
Total Dana Perimbangan Kota Banjarmasin
Tahun 2007-2016

Tahun	Dana Perimbangan	
	(rupiah)	%
2007	394.693.21	1,29
2008	445.675.86	1,42
2009	509.325.68	1,19
2010	570.350.78	5,02
2011	442.371.00	-2,24
2012	664.770.00	3,82
2013	548.643.00	-1,74
2014	758.384.00	1,10
2015	842.336.75	6,95
2016	848.197.80	3,12

Sumber :Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Dilihat pada Tabel 1.5 bahwa Dana Perimbangan di Kota Banjarmasin cenderung Meningkat setiap tahunnya pada tahun 2007 Dana Perimbangan Yaitu sekitar 394.693.21 sekitar 1,29 % dan pada tahun 2008 Dana perimbangan sekitar 445.67.86 atau sekitar 1,42% dan di tahun 2009 dan 2010 Dana Perimbangan naik dari 509.325.68 dan 570.350.78 yaitu sekitar 6,21% , namun pada tahun 2011 dan 2013 mengalami penurunan yang awalnya 570.350.78 menjadi 442.371.00 dan di tahun 2012 yang awalnya 664.770.00 menjadi

548.643.00 yang berarti di tahun 2011 mengalami penurunan -2,24 % dan -1,74 % di tahun 2013 hal ini di sebabkan karena adanya koreksi atas DAU dari pemerintah pusat dan disebabkan karena adanya defisit anggaran dan penerimaan Dana Perimbangan jauh dibawah target. Namun pada tahun selanjutnya Dana Perimbangan kembali meningkat yaitu pada tahun 2014 sekitar 758.384.00 atau naik sekitar 1,10% , sedangkan pada tahun 2015 yaitu meningkat menjadi 842.336.75 yaitu sekitar 6,95% yang dikarenakan jumlah alokasi dana yang ditransfer ke daerah terus mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2016 adalah sekitar 848.197.80 atau sekitar 3,12% dan rata-rata kenaikan Dana Perimbangan selama 10 tahun adalah 11,49%.

Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 1.6 Hasil Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimaste
1	.986 ^a	.973	.966	8207373,112

a. Predictors : (constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependen Variabel: Belanja Daerah

Dari hasil regresi pada tabel 1.6 yaitu dapat di ketahui bahwa pengaruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap variabel dependen Belanja Daerah diperoleh R² (R square) yaitu 0.973 persen hal ini berarti sebesar 97.3 (persen) variasi faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah dapat di jelaskan oleh (dua) variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, lalu sisanya sebesar 9.73 persen atau sebesar 9.73 Milyar dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Uji Simultan (F)

Hipotesisi H₁ diterima apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel (F_{df1,df2 (a)}) atau nilai signifikan lebih kecil dari alpha 5% (0,05), telah dirumuskan yaitu :

$$F_{tabel} = \alpha ; (k - 1), (n - k)$$

$$= 0.05 ; (2 - 1), (10 - 2)$$

$$= 0.05 (1,8)$$

$$= 5,32$$

Tabel 1.7 Hasil Uji F

ANNOVA^a

Model	F	Sig
Regression1	143.555	.000^b
ResidualTotal		

Dapat dilihat diatas tabel 1.7 nilai F-hitung 143,555 memiliki perbandingan lebih besar dari nilai F-tabel dan signifikannya bernilai 0.05 yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa cara pengambilan keputusan uji simultan dalam analisis regresi tersebut adalah penelitian dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Belanja Daerah.

Uji Partial (t)

$$T_{\text{tabel}} = \alpha / 2; (n - k)$$

$$= 0,025 ; (10 - 2)$$

= 0,025; 8 (dengan membandingkan dua sisi (signifikan 0,025) disimpulkan adalah untuk T_{tabel} yaitu sebesar 2,306

Keterangan :

$$\alpha = 0,025$$

n = Banyaknya Tahun

k = Jumlah variabel yang digunakan

Tabel berikut menunjukkan ringkasan hasil analisis pengujian T-statistik dengan menggunakan program komputer SPSS dengan data Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah data variabel independen dan Jumlah Belanja Daerah sebagai variabel dependen :

Tabel 1.8
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model		T	Sig.
(constant)		.612	.557
Pendapatan Daerah	Asli	-5,327	.001
Dana Perimbangan		.441	.671

a. Dependent Variabel : Belanja Daerah

Hasil output SPSS dapat disimpulkan bahwa :

- a) Nilai dari T_{hitung} Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dari pada t_{tabel} ($-5,327 < 2,306$) dengan signifikan 0,05 adalah 0,01 artinya PAD berpengaruh terhadap Jumlah Belanja Daerah secara signifikan.
- b) Nilai t_{hitung} variabel Dana Perimbangan kecil nilainya dari nilai t_{tabel} ($0,441 < 2,306$) dengan $t_{signifikan}$ 0,05 yaitu 0,671. Artinya Dana Perimbangan sebagai Variabel Bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu Belanja Daerah.

Pengambilan keputusan pada uji parsial dalam analisis regresi berganda maka dapat artikan sebagai berikut :

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan secara parsial terhadap banyaknya belanja daerah Kota Banjarmasin.
2. Variabel dana perimbangan tidak berpengaruh secara signifikan secara parsial terhadap banyaknya jumlah Belanja Daerah di Kota Banjarmasin.

Hasil Analisis Regresi

Tabel 5.7: Hasil Regresi Variabel

Model	Nilai Koefisien Regresi
Constant	7.382
Pendapatan Asli Daerah	5.400
Dana Perimbangan	.153

Secara matematis model fungsi dari regresi Linier berganda diatas dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = 7,382 + 5,400 (X_1) + 0,153 (X_2) + E$$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah

X₁ = Pendapatan Asli Daerah

X₂ = Dana Perimbangan

E = Variabel Pengganggu (error term)

maka :

1. *Constant* (a)

Constant memiliki nilai 7,382 meyakinkan seluruh variabel independen bebas sama dengan nilainya (nol) jadi jumlah Belanja Daerah yaitu sebesar 7,382 Milyar Rupiah

2. Pendapatan Asli Daerah (X₁) belanja daerah memiliki koefisien nilai sebesar 5,400 Milyar rupiah. Variabel independen lainnya tetap dan pada tingkat Pendapatan Asli Daerah akan kenaikan 1%, dari beberapa nilai Belanja Daerah akan meningkat sebesar 5,400 Milyar Rupiah . Koefisien bernilai positif berarti Pendapatan Asli Daerah memiliki suatu hubungan positif atau searah terhadap belanja daerah.
3. Dana Perimbangan (X₂) terhadap Belanja Daerah mempunyai nilai koefisien sebesar 0,153%. Kesimpulannya pada variabel independen, nilainya tetap untuk tingkat Dana Perimbangan akan naik sebesar 1%, jadi pada Belanja Daerah meningkat sebesar

0,153%. Koefisiennya positif dan Dana Perimbangan mempunyai hubungan positif atau searah dengan Belanja Daerah.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari hasil uji koefisien determinasi (R^2) pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dandana perimbangan terhadap belanja daerah memiliki nilai tinggi sebesar 0,973. Variasi variabel jumlah Belanja Daerah dihasilkan dengan baik oleh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Sedangkan 1,8 persen disimpulkan oleh faktor dari luar model. Untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi Belanja Daerah di Kota Banjarmasin maka diperlukan penelitian lebih lanjut. Uji F statistik ditunjukkan pada variabel bebas yang dihasilkan oleh model regresi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan pada tahun 2007 s.d 2016 di kota Banjarmasin jika diuji secara bersama-sama atau serempak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Banjarmasin. Dari hasil Uji t menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di Kota Banjarmasin disimpulkan bahwa taraf keyakinan yaitu 95 persen ($\alpha = 5$ persen), variabel Pendapatan Asli Daerah signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah, sedangkan Variabel Dana Perimbangan tidak signifikan mempengaruhi Belanja Daerah. Dana Perimbangan Berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, di karenakan pada tahun 2011 dan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar -2,24% maka dari itu hendaknya pemerintah Menggunakan dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk belanja-belanja yang mampu meningkatkan pelayanan kepada publik. Penelitian ini dapat dijelaskan pada variabel yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah.

SARAN

Dari penelitian ini hasilnya adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, oleh karena itu pemerintah daerah lebih mengoptimalkan potensi terhadap pendapatan asli daerah. Pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah bisa mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor terkait melalui pertumbuhan ekonomi, misalnya sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan dana perimbangan berpengaruh positif dan tidak

berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, maka dari itu hendaknya pemerintah Menggunakan Dana Perimbangan dapat diperoleh dari pemerintah pusat untuk belanja-belanja yang mampu meningkatkan pelayanan kepada publik.

Daftar Referensi

- Apridar. 2009. *Ekonomi Internasional : Sejarah, Teori, Konsep, Permasalahan Dalam Aplikasinya*. Yogyakarta : Graha Ilmu..
- Boediono, 1992, *Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4: Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPF
- Bambang Kustianto, 2007 *Peranan Modal Asing terhadap Pertumbuhan ekonomi indonesia*
Jurnal Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, jakarta Vol (5) 26-36
- Cardiman. (2006). strategi belanja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat . In cardiman.
- Gujarat, Damodar N, 1995, *Basic Econometrics, Third Edition*, Singapore: McGraw Hill Book. Co.
- Gujarati, Damodar N, 1993, *Ekonometrika Dasar*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009,
Basic Econometrics Fifth Edition, Singapore: McGraw Hill Book. Co.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Hasan, Iqbal. 2008. *Pokok – Pokok Materi Statistik 2 : Statistik Inferensif*. Jakarta Bumi Aksara.
- Hariyanto, B. (2005). Bambang Hariyanto, (2005), *Esensi-esensi Bahasa Pemrograman JAVA*. Bandung.
- Halim. (2001). *manajemen keuangan daerah*. yogyakarta: upp amp.
- Jhingan, M.L, 1993, *Ekonomika Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta : Raja Grafindo
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*, Jakarta : Erlangga
- Mangkosoebroto. (1993). *Ekonomi Publik*. In *Ekonomi Publik, Edisi-III*. Yogyakarta.